

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rusia adalah salah satu negara produksi energi paling utama di dunia, dan negara paling penting bagi tujuan-tujuan pengamanan suplai energi Eropa. Eropa juga merupakan kawasan paling dituju oleh ekspor energi Rusia. Hubungan saling ketergantungan ekonomi yang melingkupi ini telah menciptakan kerjasama yang kuat antara kedua pihak. UE telah menetapkan bahwa terdapat kepentingan yang vital dalam meningkatkan dan memperluas peran Rusia sebagai pemasok gas dan minyak pada kondisi komersial yang sesuai ke pasar UE. Begitu juga dalam memperkuat Rusia sebagai pemasok yang dapat dipercaya dan aman melalui transfer teknologi dan investasi ke negara tersebut serta meningkatkan infrastruktur energinya. IEA telah membagi rata-rata dari kebutuhan investasi Rusia sebesar 726 billion euro antara tahun 2001 dan 2020 sebagai berikut: 28% untuk minyak, 27% untuk gas, 25% untuk listrik, 12% untuk energi yang dapat diperbaharui, 5% untuk bahan kekuatan nuklir dan 3% untuk batubara.

Dengan didukung oleh faktor internal dan eksternal yang sudah dipaparkan dalam bab sebelumnya, Putin menerapkan diplomasi energinya terhadap UE. Diplomasi energi tersebut berpijak pada paradigma Putin yang menganggap energi sebagai komoditas strategis. Mengingat akan semakin meningkatnya kebutuhan akan energi bagi negara-negara UE dan semakin derasnya permintaan akan pasokan gas pada masa-masa yang akan datang, maka Putin berusaha untuk menjaga kekayaan energi Rusia agar bisa terus dimanfaatkan dalam rangka memenuhi segala kepentingan ekonomi Rusia sampai beberapa dekade ke depan.

Sedangkan sengketa gas yang melibatkan Rusia dan Ukraina tahun 2006 telah menambah keyakinan Putin bahwa energy merupakan instrument diplomasi yang sangat strategis untuk menjaga pengaruh kekuatan Rusia terhadap negara-negara CIS sekaligus membangun ekonomi Rusia yang lebih baik. Rusia ingin memberi sinyal kepada UE melalui sengketa gas ini akan efektifitas diplomasi

energi dalam hubungan antar kedua negara, dengan harapan agar hubungan ini dapat terjalin erat dan langgeng.

Untuk memanfaatkan keunggulan kekuatan alamnya terhadap UE, Rusia terus meningkatkan kapasitas produksinya. Hal ini berarti bahwa anugerah kekayaan natural gas dan minyak harus didukung dengan kemampuan eksplorasi dan menjaga kelancaran suplai energi. Untuk itu terdapat dua hal penting yang menjadi perhatian Putin dalam menjalankan kebijakannya yaitu teknologi eksplorasi dan media transportasi (*pipeline, tanker or rail*). Keteringgalan Rusia dalam teknologi eksplorasi sudah mulai diperbaiki dengan merestrukturisasi industri minyak Rusia pada tahun 1991 menjadi *joint stock companies*.

Restrukturisasi ini melahirkan sepuluh perusahaan Lukoil, Yukos, Surgutneftegaz, TNK, Tatneft, Sibneft, Slavneft, Rosfneft, Bashneft dan Sidaco. Dengan perusahaan ini intervensi asing melalui investasi dengan imbal transfer teknologi sangat dimungkinkan. Sebagai contoh TNK yang bekerja sama dengan BP dengan *share* kurang lebih 50 persen untuk perusahaan Inggris tersebut. Jalan lain yang ditempuh Rusia adalah menggunakan media perundingan dengan UE dengan jaminan kelancaran suplai natural gas akan imbal transfer teknologi. Akan tetapi hal ini terbentur juga pada masalah dominasi monopolistik dari perusahaan Gazprom dan tidak mencukupinya *pipeline* oleh Transneft.

Oleh sebab itu, Putin yang memiliki paradigma bahwa energi merupakan komoditas strategis tidak sepenuhnya melakukan semua kebijakan yang direkomendasikan. Karena bagaimanapun juga, Gazprom masih memerlukan kerjasama dengan UE untuk memecahkan segala permasalahan yang terjadi dan mengantisipasi timbulnya kesalahpahaman dalam menyepakati perjanjian yang telah disetujui bersama. Dengan itu, Rusia dapat selalu menggunakan energinya sebagai instrumen diplomasinya terhadap UE karena dapat mengamankan pasokan gasnya sehingga arti strategis dari komoditas energi dapat selalu terwujud dan terpenuhi demi mencapai kepentingan nasional Rusia berupa peningkatan kesejahteraan bersama.

5.2. Rekomendasi

Diplomasi energi terdiri dari sejumlah perangkat kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan. Dalam kaitan ini, pemerintah Indonesia perlu menegaskan paradigma apa yang ingin digunakan sebagai pedoman atau tujuan dari kebijakan keamanan energi yang dirumuskannya. Pemerintah perlu kiranya menegaskan bahwa energi adalah komoditi strategis mengingat peran vitalnya atas perekonomian nasional, sehingga distribusi energi tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar mengingat hal tersebut mengundang resiko terhadap kepastian pasokan sumber daya energi dan kerawanan energi. Dalam hal ini negara yang diwakili oleh pemerintah harus mengambil peran sentral untuk menjamin pasokan energi dan menjamin keamanan energi.

Namun sampai sejauh ini selain menaikkan harga BBM, upaya pemerintah dalam menjamin keamanan energi di dalam negeri tampaknya lebih difokuskan pada upaya menggenjot produksi domestik melalui pemberian hak eksplorasi kepada kalangan investor local maupun asing pada beberapa lokasi yang potensial terdapat minyak bumi serta mengupayakan konversi konsumsi dari minyak tanah kepada gas. Pemerintah juga berupaya untuk membatasi ekspor gas ke luar negeri dalam rangka mencukupi kebutuhan energi di dalam negeri. Namun upaya-upaya ini nampaknya tetap terkesan sporadis dan tidak merupakan bagian dari suatu kebijakan energi yang komprehensif.

Selanjutnya dengan menyadari dimensi internasional gejolak harga minyak bumi dan isu energi, serta potensi dampak negatifnya terhadap terhadap keamanan dan kedaulatan negara, maka sangat logis bagi pemerintah untuk merumuskan suatu strategi diplomasi guna mendukung kebijakan keamanan energi. Dalam hal ini tujuan kebijakan keamanan energi yang berupa tersedianya suplai atau persediaan cadangan sumber daya energi yang cukup untuk mendukung kebutuhan konsumsi energi di dalam negeri (stockpiling) dan mengupayakan stabilitas harga sumber daya energi khususnya minyak bumi. dapat didukung dengan inisiatif diplomasi yang aktif baik di tingkat bilateral, regional maupun multilateral.

Melalui diplomasi di tingkat bilateral, kebijakan stockpiling ini dapat didukung dengan mencari sebanyak mungkin alternatif impor minyak bumi dengan harga beli yang tidak terlalu membebani APBN. Sebab dalam hal ini pemerintah harus berupaya menyediakan sejumlah cadangan sumber daya energi dengan menetapkan suatu batasan jumlah yang dianggap aman dalam pengertian cukup untuk mendukung konsumsi kebutuhan dalam negeri dalam jangka waktu tertentu. Pemerintah karenanya perlu secara aktif melakukan pendekatan terhadap semua negara-negara yang diketahui sebagai produsen utama minyak bumi dan gas alam. Dalam hal ini dibutuhkan suatu upaya strategi negosiasi yang jeli dari pemerintah serta juga kesiapan untuk memberikan suatu konsesi tertentu sebagai bentuk *trade off* kepada negara-negara tersebut dalam rangka mendapatkan suplai minyak dan gas yang cukup dengan harga yang diinginkan. Dalam kaitan ini pula maka seruan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada forum Konferensi Tingkat Tinggi negara G-8 yang lalu, agar negara produsen utama minyak dapat juga memperhatikan kepentingan negara-negara lain dengan membantu negara-negara yang mengalami krisis pangan perlu disambut baik. Kita tentunya berharap bahwa seruan Presiden RI ini merupakan langkah awal suatu diplomasi energi yang lebih aktif dari pemerintah.

Upaya ini juga merupakan bentuk dukungan atas kebijakan diversifikasi guna menghindari ketergantungan mutlak terhadap satu sampai dua negara produsen saja yang berpotensi mengancam keamanan dan kedaulatan nasional. Kebijakan diversifikasi ini juga dapat didukung dengan menjajaki kerjasama bilateral dalam rangka pengembangan sumber daya energi alternatif di luar minyak bumi seperti biofuel, panas bumi atau tenaga nuklir dengan negara-negara yang memiliki *track record* dalam pengembangan sumber-sumber energi tersebut. Sedangkan di tingkat regional Indonesia dapat mengupayakan terbentuknya mekanisme stok minyak bumi bersama-sama negara-negara ASEAN sebagai antisipasi jika terjadi gangguan terhadap suplai maupun gejolak harga.

Sementara itu upaya untuk menstabilkan harga minyak bumi di pasar internasional, yang meski tidak mungkin lagi dapat diturunkan, tapi setidaknya dapat lebih mudah diprediksi sehingga tidak terus menerus menjadi kendala dalam

perencanaan APBN maupun bagi kepastian aktivitas ekonomi di dalam negeri, pada akhirnya tidak dapat dicapai tanpa adanya kerja sama dan saling pengertian antara negara produsen dan konsumen. Meskipun saat ini terdapat kecenderungan menurunnya harga minyak bumi namun tanpa transparansi pasar dan dialog antara produsen dan konsumen maka harga minyak dunia akan cenderung terus berfluktuasi yang akan berdampak negatif pada perekonomian dunia terutama negara-negara berkembang.

Untuk itu Indonesia perlu mengingatkan dengan tegas bahwa gejolak harga minyak bumi saat ini berdampak negatif bagi perekonomian negara berkembang. Dalam jangka menengah dan panjang Indonesia perlu berupaya memperjuangkan terbentuknya suatu forum dialog multilateral antara negara produsen dan konsumen yang dapat turut mendorong terciptanya ekuilibrium baru harga minyak bumi di pasar internasional yang lebih transparan dan rasional. Indonesia juga dapat mendorong terbentuknya kesepakatan internasional melalui forum PBB untuk menertibkan pasar modal dan komoditi internasional dari ulah para spekulasi yang turut berdampak atas gejolak harga minyak bumi.

Dalam konteks inilah kita seharusnya meletakkan wacana perlu tidaknya Indonesia mempertahankan keanggotaannya pada forum OPEC. Sebelum memutuskan untuk keluar dari OPEC, para penentu kebijakan perlu mengkaji sampai sejauh mana upaya-upaya diplomasi di forum multilateral dapat didukung oleh keanggotaan Indonesia pada forum OPEC. Karena itu diharapkan keputusan pemerintah untuk keluar dari OPEC beberapa waktu yang lalu hendaknya sudah berdasarkan pertimbangan yang matang dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa.

Masa depan perekonomian dunia kiranya masih akan terus dihantui oleh tingginya harga minyak, yang akan terus menjadi beban bagi pembangunan ekonomi negara-negara di dunia khususnya negara-negara berkembang. Selanjutnya terkonsentrasinya suplai pada beberapa negara juga akan selalu mendorong munculnya persepsi kekhawatiran terhadap gangguan suplai energi yang semakin menimbulkan ketidakpastian pada kondisi energi dunia. Di tengah dinamika pasar energi global itu, Indonesia, menghadapi persoalan kekurangan dan kelangkaan sumber anggaran pemerintahan. Pemerintah berdalih bahwa tak

banyak pilihan kebijakan yang tersedia untuk mengatasi soal ini, dan penarikan subsidi atas harga energi adalah salah satu pilihan yang paling realistis dan punya dampak penambahan anggaran yang serta-merta.

Dengan menyadari pentingnya faktor energi sebagai pendukung perekonomian nasional, keamanan nasional dan bahkan bagi kedaulatan suatu negara, maka konsep keamanan energi menjadi konsep yang penting untuk diperhatikan. Dalam kaitan ini sudah saatnya Indonesia secara serius merumuskan suatu kebijakan nasional keamanan energi. Selanjutnya dengan menyadari potensi negatif kerawanan energi pada keamanan dan kedaulatan negara serta keterkaitan yang erat antara fenomena gejolak harga minyak bumi dengan dinamika politik ekonomi internasional, maka suatu kebijakan keamanan energi yang komprehensif perlu didukung pula oleh upaya diplomasi yang aktif di tingkat bilateral, regional dan multilateral.

